TOPIK

- » [BERITA UTAMA](#)
- » [TAJUK RENCANA](#)
- » [BANDUNG RAYA](#)
- » [DAERAH](#)
- » [NUSANTARA](#)
- » [EKONOMI](#)
- » [KAMPUS](#)
- » [OLAHRAGA](#)
- » [ARTIKEL](#)
- » [APA SIAPA](#)
- » [SURAT PEMBACA](#)

LAINNYA

- » [SEKILAS BANDUNG](#)
- » [LINTAS DAERAH](#)
- » [EKONOMI SINGKAT](#)
- » [OLAHRAGA RINGKAS](#)
- » [MANAJEMEN QOLBU](#)

ARSIP

- » [EDISI 2004-2005](#)

WEBMAIL

ARTIKEL

Kamis, 10 Maret 2005

SUPLEMEN

IKLAN

Soalnya Adalah Ketidakpedulian Pemerintah Ambalat dan Nasib Nusa Kita

Oleh Ir. GEDE H. CAHYANA, M.T.

AMBALAT mencuat. Setelah Sipadan dan Ligitan, kini Malaysia agresif mengklaim sepotong kawasan di Laut Sulawesi, utara Kalimantan Timur sebagai wilayahnya. Satu demi satu nusa kita dipetik. Dipereteli. Hanya satu sebabnya: pemerintah tak peduli pada nusa-nusa itu. Bukan pemerintah sekarang saja, melainkan juga yang dulu. Jangankan peduli, terpikirkan saja belum.

Buktinya, ratusan nusa di kawasan itu tak bernama. Ribuan nusa lagi bernasib sama di lain tempat. Di peta daerah saja tidak kelihatan, terlebih lagi di peta nasional. Jangan-jangan petugas patroli pun tak pernah berani mendekati apalagi mengunjungi nusa-nusa itu karena tak tahu siapa pemiliknya. Takut dianggap melanggar teritorial negara jiran? Yang terjadi, kita malah disalip. Didahului. Negeri jiranlah yang justru ofensif masuk ke wilayah kita. Tak hanya militer dan kapalnya, tapi juga nelayan dan mafia kayu ilegalnya.

Ambalat membuat pemerintah kita reaktif. Setelah kebakaran jenggot dinista kasus eksodus TKI (didenda, dicambuk, dan diperkosa) yang merendahkan harga diri bangsa di depan orang Malaysia, kini muncullah klaim hak milik pulau. Secara geografis pulaunya kecil, semacam Atol (pulau karang), namun secara geologis kaya sumber alam. Negeri jiran memang cerdik. Dia belajar dari kasus Sipadan-Ligitan ketika kita diterpa krisis tahun 1997. Walaupun bertahun-tahun, akhirnya mereka memperoleh kedua pulau itu lewat Mahkamah Internasional. Kini, ketika bencana menerpa di sana-sini, terutama Aceh, mereka ingin mengulang lagi kesuksesan itu.

Oleh karena itu, cara terbaik bagi pemerintah adalah tegas atas garis batas negara. Jangan terlalu terkendala lantaran serumpun. Justru kata serumpun inilah yang mereka manfaatkan buat mengajak kita masuk ke Mahkamah Internasional. Kitalah yang proaktif mengupayakan perundingan garis batas. Inisiatif diplomatik mesti intensif dilakukan pemerintah. Kitalah yang paling berkepentingan atas garis batas dan mewujudkannya dalam bentuk ratifikasi perjanjian bilateral. Tanpa perjanjian, negara lain justru merasa di atas angin dan malah senang. Kita yang rugi. Upaya itu pun dibuat tidak hanya dengan Malaysia tapi juga negara lain yang berbatasan

dengan kita. Satu syaratnya, diplomat kita harus ulung, menguasai sejarah perkembangan kerajaan di Asia Tenggara dan sejarah kolonialisme Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris serta punya peta yang tepat.

Maka, andaikata Ambalat dan East Ambalat jatuh ke tangan Malaysia, atau soal ini berlarut-larut seperti Sipadan-Ligitan, yakinlah kita bahwa pemerintah pusat dan daerah sudah tak peduli lagi pada keutuhan nusantara. Atau, takut berhadapan dengan Malaysia. Atau, adakah Inggris dan Amerika di belakang layar mereka? Apalagi kalau Nusa Maratua dan Sambit di wilayah itu juga ikut-ikutan diincar dan diungkit-ungkit, ini alamat kiamat; habislah nusa-nusa di garis batas itu. Belum lagi nusa yang berbatasan dengan negara selain Malaysia.

Seperti halnya si kembar Sipadan-Ligitan, kasus Ambalat hanyalah dampak. Dampak ketidakpedulian pemerintah terhadap laut. Siapa yang tahu Sipadan dan Ligitan sebelum kasus itu ditulis di media massa? Mayoritas kita tak tahu nusa itu. Masih banyak yang bertanya-tanya, di mana Sipadan-Ligitan itu setelah Mahkamah Internasional di Den Haag memutuskan keduanya menjadi milik Malaysia pada 18 Desember 2002. Akankah nusa lainnya disengketakan lagi lalu akhirnya kita dikalahkan dengan hormat karena menganggap kita bangsa pemaaf, suka mengalah, dan tak suka perang?

Tidakkah memalukan jika kita disebut bangsa lembek dan takut perang. Seharusnya perang membela negara makin ditanamkan. Namun, jangankan belajar bela negara, upaya mengenalkan wilayah negara saja tak diperhatikan. Ironis, bukan? Kita kaya laut tapi tak akrab dengan laut. Adakah yang tahu berapa sebetulnya jumlah pulau dan nusa kita? Ada yang bilang 13.677 buah, ada yang berkata 17.000 buah. Ada juga yang bilang 12.000-an. Mana yang tepat? Pasti tak ada yang yakin akan jawabannya, termasuk saya. Dari SD sampai perguruan tinggi kita cuma tahu angka-angka itu. Semuanya hanya kira-kira. Sekian ribu, sekian belas ribu atau ribuanlah. Selalu begitu jawaban kita.

Tak peduli nusa-laut

Akar klaim Malaysia bertolak dari ketidakacuhan kita pada wilayah dan terlalu asyik bergelut di ranah domestik. Mereka telah membuktikannya lewat Sipadan-Ligitan. Dan mereka tahu kita tak punya peta detail wilayah nusantara. Beranilah mereka mencoba lagi mengaku-aku Ambalat sebagai miliknya. Syukur-syukur kalau menang jika dibawa ke Mahkamah Internasional. Di pihak lain, kita justru sebaliknya, merasa tak bersalah dan acuh tak acuh ketika ada pulau karang yang dieksploitasi negara lain. Kita pun sangat tak peduli ketika minyak, batu bara, gas, dan emas disedot negara asing.

Apa sebetulnya yang terjadi pada diri kita? Kenapa selalu kecolongan dan harus terkaget-kaget? Hулunya adalah pendidikan.

Sejak kecil kita tak dikenalkan pada wilayah nusantara luas ini. Kita hanya tahu Sabang dan Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Masih untung ada yang tahu dari Sangihe sampai Rote. Cuma itu. Kita tidak dikenalkan pada nusa-nusa lain, baik yang berpenghuni maupun tidak.

Itu semua berakar di pemerintah kita yang dulu. Pemerintah salah memformat pendidikan. Pelajaran geografi cuma mengupas pulau-pulau besar. Tak ada temuan nusa-nusa baru yang masuk ke buku. Dari tahun ke tahun nyaris dari itu ke itu saja. Tak ada materi baru yang signifikan. Materi tahun 1970-an masih sama dengan materi abad ke-21. Akibatnya, kita tak pernah tahu mana batas wilayah negara kita. Kita terlalu dicekoki pelajaran P4 dan PPKn, tapi tak masuk ke substansi kepemilikan wilayah. Atau hanya sekilas lintas. Hasilnya, kita tak tahu mana batas wilayah di darat, mana batas di laut, apalagi di udara. Lihatlah ratusan kilometer perbatasan darat di Kalimantan-Malaysia. Betapa banyak penyusup dari dan ke Malaysia atau dari dan ke Indonesia. Tak terkontrol. Sangat longgar. Pelarian TKI adalah contoh gambelangnya.

Yang betul-betul mendebarkan pernah terjadi, yaitu rental pulau-pulau kecil. Porsi 40% dari luas pulau dieksploitasi dan sisanya untuk kawasan lindung. Kalau ide ini benar dilaksanakan pastilah habis pulau itu dibangun. Takkan pernah ada yang namanya kawasan lindung. Telebih lagi pejabat kita senang disogok dan rendah diri di depan orang asing. Pembabatan hutan di pulau besar saja tak mampu disetop. Pencuri kayu lolos di laut lepas. Yang lenyap mencapai 1,5 juta hektare/tahun. Pasti lebih tak mampu lagi mencegah pembabatan di nusa-nusa itu. Setelah satu demi satu disewa orang (negara) asing, kita pun hanyalah pekerja di nusa itu. Yang menyedihkan, banyak yang justru bangga bekerja pada orang asing. Tapi untunglah isu itu lenyap dan mudah-mudahan tak muncul lagi.

Kembali ke soal Ambalat. Ambalat adalah harga diri. Janganlah mau dikalahkan anasir asing. Telah banyak kasus spionase seperti intersepsi pesawat mata-mata Australia dan Amerika. Terakhir di Aceh. Betapa banyak pasukan asing yang bebas jalan-jalan di teritorial kita. Apa saja yang mereka lakukan? Memasang alat sadap? Tak banyak yang kita tahu. Kalau pun ketahuan, selalu dimaafkan tanpa surat protes. Apakah ini karena kita bangsa yang santun? Ataukah karena bernyali kerdil? Itu kasus yang terdeteksi. Lalu bagaimana yang tak terdeteksi?

Jika kita tetap tak peduli pada nusa kita, seperti Maratua dan Sambit, juga pulau-pulau kecil tak berpenghuni lainnya dan menganggapnya tak berguna, yakinlah suatu saat kelak kita kebakaran jenggot lagi. Disengketakan lalu akhirnya kalah. Sebagai contoh, kita selalu ketinggalan dalam mendeteksi pencurian ikan dan hasil laut lainnya termasuk harta karun dari kapal karam. Pencurian ikan dengan pukat harimau (*trawl*) di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan lolos begitu saja. Malah ada yang merambah Laut

Jawa, kawasan laut Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, dan Timur. Lebih parah lagi di Maluku. Mampukah polisi perairan dan angkatan laut kita mengawasinya?

Kecuali diklaim negara lain, boleh jadi banyak sudah nusa kita yang lenyap begitu saja tanpa pernah ada yang tahu. Ini berkaitan dengan terumbu karang. Apalagi hanya 7-10% terumbu karang yang tergolong sangat baik dari total luas 60.000 km². Kerugian akibat kerusakan tersebut 1,2 juta dolar Amerika setahun. Akibatnya, entah berapa buah nusa kita yang tenggelam seperti Pulau Air Kecil, Ubi Besar, Ubi Kecil, dan Vader Smith di Kep. Seribu akibat pengambilan terumbu karang.

Isu lainnya lagi dari negara jiran ialah limbah beracun. Bahkan Singapura terang-terangan mengeksport limbah ini ke Batam dan pulau sekitarnya. Maukah kita hidup di kubangan zat toksik-radioaktif yang dibenamkan di nusa-nusa itu? Maukah kita menyulut bom waktu bencana lingkungan? Daripada menyimpan limbah beracun di negaranya, lebih murah dan aman bagi mereka dengan menjualnya atau mengirimkannya (tentu secara diam-diam) ke nusa-nusa di nusantara kita, bukan?

Akhirnya, apa yang mesti kita upayakan? Satu di antaranya, dan ini jangka panjang, adalah pembelajaran di sekolah formal dan nonformal. Beri tahulah siswa bahwa laut kita luas, pulau kita belasan ribu dan pasti jumlahnya, pasti letaknya. Beri tahulah nusa-nusa mana saja yang berbatasan dengan negara tetangga, baik dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, Australia dan Timor Timur. Cobalah ekspos nusa-nusa itu. Iklankanlah di media massa. Ingatkan, sekecil apa pun nusa itu, di bawahnya ada kekayaan alam yang menjadi milik mereka sesuai amanat pasal 33 UUD 1945.

Upaya lain, bukalah perbincangan dengan negara-negara tersebut agar batas negara masing-masing menjadi jelas. Kitalah yang berinisiatif, bukan mereka. Sebab, kitalah yang paling berkepentingan.***

Penulis, Pemerhati masalah lingkungan laut, dosen Teknik Lingkungan Universitas Kebangsaan, Bandung.